LAMPIRAN XXIX : PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 188.45/ /418.08 / 2023
TANGGAL : - - 2023

RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2023

DAFTAR ISI

Halaman Judul i

Daftar Isi ii

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.4 Maksud dan Tujuan 5

1.5 Sistematika Penulisan..... 5

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020 DAN TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD 6

2.2 Analis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 13

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....

2.3 Review terhadap rencana awal SKPD 17

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN dan SASARAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional 21

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 21

3.3 Program dan Kegiatan .....

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan SKPD 36

BAB IV : PENUTUP..... 51

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah, merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencan Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah, guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat Program, Kegiatan, Lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan Rencana Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);
29. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 35 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 94);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 133);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 176);
33. Peraturan Bupati Kediri Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2023 Nomor 33)

3. Maksud dan Tujuan

❖ Maksud

Sebagai pedoman dan arah bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2024 sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah.

❖ Tujuan

Memperlancar tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kediri sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten Kediri dalam rangka mendukung tercapainya visi, misi, kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Kediri tahun 2024.

4. Sistematika penulisan

Rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kediri terdiri dari 4 Bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar belakang

1.2.Landasan Hukum

1.3.Maksud dan Tujuan

1.4.Sistematika penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Lalu Capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraaan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

1.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

1.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

1.3. Program dan kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL PELAKSANAAN RENJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2022 dan 2023

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.

Secara umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah dapat memenuhi tugas dan fungsi yang dibebankan kepada institusi lingkup Pemerintah Daerah. Hal ini tercermin dengan dicapainya Rencana Kerja Tahun 2022. Dari 3 (Tiga) sasaran yang terdiri dari 8 (Delapan) Program yang diuraikan ke dalam 13 kegiatan telah disediakan anggaran untuk melaksanakan semua aktifitas meskipun belum dapat terserap secara optimal. Dari hasil pengukuran kinerja dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengalami penurunan penyerapan anggaran yaitu 52,73% . Penyerapan anggaran sehingga mengalami penurunan dibanding Tahun 2022 yaitu 94,06 % . hal ini dikarenakan anggaran Hibah Pilkada sudah dialokasi 100 % di Bakesbangpol. Dan Anggaran hibah tersebut diserap 40% (sesuai dengan aturan yang berlaku). Adapun pencapaian sebagian besar target indikator kinerja kegiatan dan program. Hal ini secara umum dapat dilihat dari :

1. Terpeliharanya kondisi kerukunan umat beragama di Kabupaten Kediri yang semakin baik dan kondusif.
2. Meningkatnya wawasan kebangsaan, nasionalisme dan patrotisme masyarakat.
3. Bertambahnya kesadaran masyarakat sebagai warga negara untuk melaksanakan hak dan kewajiban dalam bela negara.
4. Terlaksananya Upacara- upacara Hari Besar Nasional.
5. Pembauran masyarakat etnis dan pribumi berjalan lancar dan konflik-konflik bernuansa SARA relatif tidak pernah terjadi.
6. Situasi daerah aman dan kondusif sehingga sangat mendukung kelancaran kegiatan ekonomi, politik dan sosial budaya di masyarakat.
7. Indikasi-indikasi permasalahan kemasyarakatan dapat terdeteksi dan terantisipasi sejak dini sehingga relatif tidak ada konflik yang signifikan.

8. Kesadaran dan penghormatan terhadap HAM terus berkembang baik di lingkungan Aparat Pemerintah maupun masyarakat terminimalisirnya pelanggaran /permasalahan HAM di daerah.
9. Menurunnya frekuensi unjuk rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pembangunan dan terhindarnya kegiatan unjuk rasa dari tindakan anarkhis sebagai indikasi dari keberhasilan pendidikan politik masyarakat.
10. Meningkatnya partisipasi LSM/Ormas dan Parpol, dalam pelaksanaan pendidikan politik yang berdampak pada meningkatnya kuantitas masyarakat yang memahami kebijakan/UU.
11. Terlaksanaya persiapan pentahapan PEMILU serentak di Kabupaten Kediri dengan aman dan lancar tanpa kendala apapun sesuai dengan agenda yang sudah ditetapkan.

Adapun secara rinci capaian Target atau Realisasi Kegiatan Program Tahun 2023 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kediri dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

HASIL EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN KEDIRI

TRIWULAN IV TAHUN 2023 PADA BAKESBANGPOL

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2023	
1	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik								
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Persentase kegiatan penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**3.630.597.489**	**89%**	**826.004.921,00**	**100%**	**3.366.022.652**
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	**Persentase penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan**	**100%**	24.847.336,00	**25%**	**28.088.516,00**	**100%**	**20.165.625**
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**12 bln**	10.137.336,00	**3**	10.136.150,00	**12**	10.136.150
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Wakttu penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	**12 bln**	14.710.000,00	**3**	3.764.344	**12**	10.029.472
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	**Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara**	**15 unit**	**66.000.000**	**5**	**14.325.600,00**	**100%**	**29.614.956**

	Pemeliharaan Aset Tetap lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	**15 unit**	66,000,000	**5**	16.100.000	**15**	63.040.000
B	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**331.372.736**	**89%**	**17.719.512**	**100%**	**307.488.738**
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	**800 bh**	35.926.173	**396**	17.719.512	**24.500**	**35.833.512**
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	**12 bln**	8.799.500	**3**	4.780.000	**12**	7.430.000
3	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang cetakan dan Penggandaan yang disediakan	**637ctkn/ganda**	11.434.943	**213**	9.115.000	**65%**	10.381.000
4	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah bahan yang disediakan	**12 bln**	8.000.000		4.733.500	**100%**	7.978.300
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	**12 bahan**	2.519.600	**3**	677.000	**100%**	1.6570.000
6	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	**60 rapat**	264.692.520	**27**	87.356.062	**100%**	244.158.926
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**19 dok**	2.915.121.014	**15**	**608.906.722**	**94%**	**2.726.175.409**
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Waktu Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	**14 bln**	2.622.409.900	**3**	538.045.626	**100%**	2.520.214.697
	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Waktu Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	**12 bln**	241.420.000	**3**	64.501.096	**100%**	195.746.712
	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan kuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	**1 Lap**	2.907.914	**1**	900.000	**100%**	2.370.000

	SKPD							
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	12 lap	8.383.200	3	5.460.000	75%	7.844.000
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**5.075.000**	**25%**	**320.000**	**100%**	**1.120.000**
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	12 dok	5.075.000	3	320.000	100%	1.120.000
	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	**Jumlah Laporan Administrasi barang milik daerah ada perangkat daerah**	**12**	**274.649.862**	**6**	**63.569.400**	**100%**	**235.673.880**
	Penyusunan Barang Milik Daerah	**Barang milik daerah terpelihara**	**12**	**60.528.600**	**5**	**28.939.400**	**100%**	**40.245.680**
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) pada SKPD	12 Lap	9.849.000	6	5.680.000	100%	6.359.200
	Penyusunan Perencanaan Barang milik Daerah	Terpenuhinya Barang milik Daerah	6 Paket	204.272.262	3	28.950.000	100%	189.069.000
	PERENCANAAN , PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Dareah**	**100%**	**13.531.541**	**13%**	**5.952.000**	**100%**	**12.357.000**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dok	6.674.400	1	920.000	100%	6.245.000

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Lap	3.408.344	0	1.900.000	100%	2.980.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dok	3.448.797	3	3.132.000	100%	3.132.000
								Rata rata capaian kinerja (%)
								Predikat
2	**PROGAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Cakupan kelompok yang dibina tentang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan**	**80%**	**2.390.653.220**		**440.070.024**	**97%**	**2.271.534.839**
	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	**Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan Pelaksanaan bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**100%**	**2.390.653.220**		**440.070.024**	**97%**	**2.271.534.839**
	Penyusunna Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tersusunnya dokumen Program Kerja dibidang Ideologi Wasbang, Bela Negara, Karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Bangsa	1 dok	18.065.540	1	12.451.000	100%	12.451.000
	Duta Pancasila		1		1			
	Rapat Koordinasi		1		1			
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinenak Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Rumusan dok kebijakan Teknis dibidang Ideologi Wasbang, Bela Negara, Karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal	1 dok	67.728.000	1	37.191.428	100%	63.482.428

		Ika dan Sejarah Bangsa					
	Koordinasi lintas prov/nasional	1		1			
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan dibidang Ideologi Wasbang, Bela Negara, Karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Bangsa terlaksana **2195 orang**	2.175.432.600	**235**	362.288.596	**82%**	2.075.437.211
	Upacara	2		2			
	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	4		0			
	Sosialisasi Nilai-nilai Luhur Budaya	2		0			
	Sosialisasi Orientasi Kepribadian Bangsa	2		0			
	PPBN	4		0			
	Gerakan Nasional Revolusi Mental	4		0			
	PASKIBRAKA	1		0			
	Pemberitan Tali Asih LVRI	1		0			
	Pembinaan Ideologi Pancasila	2		1			
	FPK	4		0			
	TMMD	9					
	Honor	8					

	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi dibidang Ideologi Wasbang, Bela Negara, Karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Bangsa	**4 dok**	49.815.280	**2**	26.659.000	**100%**	43.509.000
	keseretariatan GNRM		**2**		**1**			
	Rakor FPK		**1**		**1**			
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Dok Pelaksanaan Monitoring dibidang Ideologi Wasbang, Bela Negara, Karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Bangsa	**3 dok**	4.410.000	**1**	1.480.000	**100%**	3.005.000
	Pembentukan dan Penumbuhan karakter Keluarga melalui peningkatan kesadaran Masyarakat dan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat , berbangsa dan bernegara	Dok Pelaksanaan Pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga dibidang ideologi wasbang , bela negara , karakter bangsa , pembauran kebangsaan , bhineka Tunggal ika dan Sejarah bangsa	**200 org**	75.201.800		**100**	**100%**	73.650.200
								Rata rata capaian kinerja (%)
								Predikat
3	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITAS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase konflik sosial Terfasilitasi**	**80%**	**2.367.363.400**	**100%**	**923.503.000,00**	**96%**	**1.959.585.264,00**

	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	**Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**100%**	**2.273.020.075**	**4**	**889.717.175**	**96%**	**2.290.015.739**
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tersusunnya dokumen Program Kerja dibidang kewaspadaan Dini, Kerjasama intelijen, Pemantuaan orang Asing, Tenaga kerja asing dan lembaga asing, Kewaspadaan perbatasan antar negara, Fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daaerah	**8 dok**	166.181.000	**4**	134.664.000	**100%**	160.322.000
	1. Rakor Tim Kewaspadaan Dini Daerah		**4 keg**		**3**			
	2. Rakor Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial		**4 keg**		**1**			
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tersusunnya bahan Rumusan kebijakan dibidang kewaspadaan Dini, Kerjasama intelijen, Pemantuaan orang Asing, Tenaga kerja asing dan lembaga asing, Kewaspadaan perbatasan antar negara, Fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daaerah	**4 dok**	755.846.500	**2**	329.266.650	**100%**	750.274.800
	1. Rakor Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat/FKDM		**4**		**1**			

	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan dibidang kewaspadaan Dini, Kerjasama intelijen, Pemantuaan orang Asing, Tenaga kerja asing dan lembaga asing, Kewaspadaan perbatasan antar negara, Fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daaerah terlaksana	**1000 org**	448.752.000	**11**	107.952.000	**100%**	452.589.000
	1. Sosialisasi/Dialog Peningkatan Pemahaman Deteksi Dini dan Penanganan Konflik		**450**					
	2. Pelayanan Rekomendasi Penelitian, KKN, PKL dan sejenisnya (1 Tahun Pelayanan)		**12**		**3**			
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi kewaspadaan Dini, Kerjasama intelijen, Pemantuaan orang Asing, Tenaga kerja asing dan lembaga asing, Kewaspadaan perbatasan antar negara, Fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daaerah	**15 keg**	141.332.000	**6**	69.024.429	**73%**	138.059.729
	Rapat-rapat koordinasi		**5 kali**		**5**			
	Perjalanan Dinas Luar daerah		**1 kali**		**1**			

	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Dokumen Pelaksanaan Monitoring kewaspadaan Dini, Kerjasama intelijen, Pemantuaan orang Asing, Tenaga kerja asing dan lembaga asing, Kewaspadaan perbatasan antar negara, Fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daaerah	**12 dok**	155.082.500	**3**	40.181.096	**100%**	133.103.210
	2. Tim Monitoring Perkembangan Kondusifitas Daerah (1 Tahun Monotoring)		**12 bln**		**3**			
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota	Dokumen pelaksaan koordinasi pimpinan daerah	**3 keg**	700.169.400	**1**	208.669.000	**100%**	682.667.000
	Tim Cipta Kondisi Keamanan Daerah		**3**		**1**			
								Rata rata capaian kinerja (%)
								Predikat
4	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase Pembinaan Ormas**	**60%**	**2.514.013.900**		**1.613.537.400**	**100%**	**1.182.527.500**
	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	**Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan Pelaksanaan dibidang pemberdayaan dan pengawasan ormas**	**100%**	**2.514.013.900**		**1.613.537.400**	**100%**	**1.182.527.500**

	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tersusunnya dokumen Program Kerja dibidang pendaftaran ormas, pembedayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	**3 dok**	51.942.100	**2**	22.100.000,00	**100%**	48.813.800
	Saresehan terkait Keormasan	**2**		**2**				
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tersusunnya bahan Rumusan kebijakan dibidang pendaftaran ormas, pembedayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	**1 dok**	4.800.000,00	**2**	2.760.000,00	**100%**	4.800.000
	rapat koordinasi	**2 kali**		**2**				
	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Dokumen Pelaksanaan Kebijakan dibidang pendaftaran ormas, pembedayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	**120 org**	2.332.597.800	**61**	1.497.106.000	**100%**	2.326.159.400
	Sosialisasi ormas	**100**		**2**				
	Hibah Ormas	**20**		**1**				
	Bintek ormas	**3**		**2**				

	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi pendaftaran ormas, pembedayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	**22 keg**	45.374.000	**6**	14.702.000	**100%**	44.758.522
	Bantuan keuangan ormas		**9 lemb**		**8**			
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Dokumen Pelaksanaan Monitoring pendaftaran ormas, pembedayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	**4 dok**	79.300.000	**2**	75.555.000	**100%**	77.180.000
	Monitoring dan Evaluasi Hibah Ormas serta Pembinaan Pengelolaan Hibah		**9 kali**		**4**			
Rata rata capaian kinerja (%)								
Predikat								
5	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Persentase partai politik yang difasilitasi**	**100%**	**95.903.880.520**		**39.972.026.931**	**100%**	**45.657.253.199**

	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI , FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAH, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/ PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK	**Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan Pelaksanaan bidang Pendidikan Politik, Etika Politik, Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai politik, pemilihan Umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantuan situasi politik**	**100%**	**95.903.880.520**	100%	**39.972.026.931**	**100%**	**45.657.253.199**
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tersusunnya dokumen Program Kerja dibidang Pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantaauan situasi politik daerah	**3 dok**	46.430.720	**2**	0,00	**100%**	45.730.000
	sarasehan terkait politik daerah dan etika politik		**2 kali**		**2**			

	Penyusunan bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantaauan situasi politik daerah	Jumlah Perumusan dibidang Pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantaauan situasi politik daerah	**11 dok**	60.434.600	**7**	42.360.000	**100%**	52.820.000
	rapat-rapat koordinasi	**2 kali**		**1**				
	perjalanan dinas	**10 kali**		**10**				
	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantaauan situasi politik daerah	**868 org**	95.656.266.400	**150**	39.899.637.022	**100%**	45.437.930.011
	Pendidikan Politik (Etika politik)	**500 org**		**0**				
	Sosialisasi Pemilu	**200**						
	Penyaluran Banpol	**10**		**0**				
	Kegiatan pengembangan demokrasi dan HAM	**150 org**		**150**				

	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantaauan situasi politik daerah	**28 dok**	119.238.800	**7**	22.829.909	**100%**	112.043.188
	Harmonisasi Supra dan infra Politik		**3**					
	Rapat Koordinasi		**10**		**2**			
	Perjalanan Dinas Luar Daerah		**15**					
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Dokumen Pelaksanaan Monitoring dibidang Pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantaauan situasi politik daerah	**4 dok**	21.510.000	**3**	7.200.000	**100%**	8.730.000
	Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Banpol		**2 keg**		**2**			
								Rata rata capaian kinerja (%)
								Predikat

6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA**	**Persentase kelompok masyarakat yang dibina terkait narkoba, kerukunan beragama dan kepercayaan**	**70%**	**538.000.800**	**80%**	**272.273.600**	**90%**	**518.541.400**
	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	**Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan Pelaksanaan dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**100%**	**538.111.800**	**100%**	**272.273.600**	**90%**	**518.541.400**
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Tersusunnya dokumen Program Kerja dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial budaya dan fasilitasi/pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Fasilitaasi kerukunan umat beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	**5 dok**	14.831.600	**161**	7.815.800	**100%**	12.381.600
	Rapat koordinasi terkait ketahanan soosial		**4**		**1**			
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Tersusunnya bahan Rumusan kebijakan dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial budaya dan fasilitasi/pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Fasilitaasi kerukunan umat beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	**6 dok**	23.756.000	**2**	9.666.000	**50%**	23.002.000

	Perjalanan Dinas Luar Daerah	6		3			
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial budaya dan fasilitasi/pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Fasilitaasi kerukunan umat beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah terlaksana	412 org	259.083.200	161	52.320.800	100%	256.961.800
	Pagelaran Seni	2		1			
	Sosialisasi FKUB	120		60			
	Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkotika/ P4GN.	300		100			
	Upacara HANI	0		0			
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Ketahanan Ekonomi, Sosial budaya dan fasilitasi/pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Fasilitaasi kerukunan umat beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	17 dok	130.815.000	4	94.600.000	100%	117.800.000
	HR Pengurus FKUB	7		1			
	Audiiensi	10		3			

	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Dokumen Pelaksanaan Monitoring Ketahanan Ekonomi, Sosial budaya dan fasilitasi/pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Fasilitaasi kerukunan umat beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	**9 dok**	109.626.000	**2**	107.671.000	**100%**	108.396.000
	Monitoring dan Evaluasi ketahanan ekonomi kab kediri	**9**		**7**				
Rata rata capaian kinerja (%)								
Predikat								
	Jumlah			107.344.620.329	44,83	44.017.148.170	91,25	**56.605.077.551**

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja pelayanan SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik meliputi satu bidang urusan Pemerintahan :

URUSAN WAJIB (Pekerjaan Umum), menyelenggarakan urusan sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mendukung Pemerintah Kabupaten Kediri di bidang kesatuan bangsa dan Politik mempunyai tugas yang sangat strategis antara lain : **melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik yang meliputi bidang-bidang politik dan hubungan antar lembaga, ideologi wawasan kebangsaan , ketahanan Ekonomi social Budaya dan Agama serta kewaspadaan**, Yaitu :

a. Pengembangan Wawasan Kebangsaan :

   Upaya untuk meningkatkan Wawasan Kebangsaan serta Kesadaran masyarakat dalam rangka menjaga tegaknya NKRI.

b. Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan :

   Upaya untuk menjaga stabilitas Keamanan wilayah terutama di Kabupaten Kediri guna menjaga dan menjamin kelangsungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta peningkatan ekonomi masyarakat.

c. Pendidikan Politik Masyarakat :

   Upaya untuk memberikan pemahaman dan Informasi terkait kebijakan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat serta menumbuhkan semangat demokrasi masyarakat menyongsong Pemiilu 2024 .

d. Pemilihan Umum :

   Upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam system demokrasi melalui kesadaran untuk berperan aktif terutama dalam penggunaan hak suara dalam setiap pemilu.

e. Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya, agama dan Organisasi Masyarakat

   Upaya meningkatkan fasilitasi kerukunan Beragama dan penghayat kepercayaan, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotikaserta pengawasan dan pemberdayaan organisasi Masyarakat.

2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu-Isu Penting yang dihadapi selama melaksanakan kegiatan pada Tahun 2022 serta Tahun 2023 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Kediri :

A. Lingkungan Eksternal

(1) Ancaman.

a. Euforia Reformasi dewasa ini berekses pada kebebasan berdemokrasi dan berpendapat yang dalam pelaksanaanya sering kurang memperhatikan etika kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga rawan terhadap eksistensi persatuan dan kesatuan bangsa dan tegaknya NKRI.

b. Kekurang pemahaman terhadap kerukunan umat beragama dan prosedur pendirian tempat ibadah rawan terhadap konflik antarumat beragama dan berakibat terganggunya kenyamanan dalam melaksanakan ibadah dan stabilitas daerah.
c. Euforia reformasi membuat kelompok-kelompok masyarakat semakin berani melakukan kegiatan-kegiatan aksi atau unjuk rasa dengan mengerahkan massa dalam jumlah relatif besar sehingga rawan terjadi tindakan anarkhis.
d. Kecenderungan peningkatan eskalasi politik setiap menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak yang memiliki kerawanan timbulnya konflik. Meskipun lawannya Bumbung kosong .
e. Sisa-sisa krisis ekonomi yang berdampak belum membaiknya proporsi peluang kerja dan ketersediaan tenaga kerja serta belum membaiknya pula indikator-indikator ekonomi lainnya berpotensi rawan terjadi tindakan kriminalitas dan penggunaan kesempatan provokasi oleh pihak-pihak yang ingin mengacau stabilitas daerah.
f. Era global dan kemajuan teknologi informasi membawa dampak-dampak negatif terhadap kondisi sosial budaya masyarakat antara lain merebaknya peredaran VCD porno, narkoba, tindakan asusila, serta tindakan meniru (imitative) adegan-adegan negatif di media elektronik.
g. Heterogenitas sosial budaya masyarakat juga masih rawan potensi konflik yang berbau SARA.
h. Euforia Demokrasi dan HAM nasional berdampak pada terjadinya kecenderungan masyarakat tertentu belum mampu memberikan penghormatan yang layak terhadap hak asasi manusia karena lebih menuntut hak daripada memenuhi kewajiban.
i. Hibriditasi Budaya yang mengarah pada pencampuran serta pergeseran Ideologi Bangsa yang berdampak banyaknya gerakan-gerakan separatis dan anarkis.
j. Dampak dari Globalisasi yang mengarah pada sulit dibendungnya beberapa aliran-aliran sesat baik atas nama agama tertentu maupun berbau SARA lain yang sangata mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat.
k. Konflik Horisontal yang bisa meluas akibat konstelasi Politik Nasional saat Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif pada semua Lini (DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota) serta adanya kecurangan baik Peserta Pemilu maupun Pendukung atau oposisi yang perlu diwaspadai karena mampu meningkatkan konflik yang mengarah pada Kriminalitas maupun SARA.
l. Pelaksanaan Pentahapan Pemilu Serentak yaitu Pilpres, Pileg DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Sedikit banyak menguras tenaga dan perhatian serius terutama dalam menjaga kondusifitas Wilayah dalam menjamin PEMILU serentak dapat berjalan Tertib, aman dan terkendali.

(2) Peluang
a. Terbitnya Tap MPR No. VI / MPR / 2001 tentang Etika Kehidupan berbangsa dimana didalamnya mengatur tentang Pokok-Pokok Etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sportifitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai bangsa.
b. Terbitnya Keputusan Besama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 dan 08 Tahun 2006 tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah dimungkinkan pemahaman masyarakat akan pentingnya kerukunan umat beragama dan proses pendirian Rumah Ibadah dapat terlaksana.
c. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian, dimana salah satu diantaranya mengatur bahwa pengawasan orang asing meliputi masuk dan keluarnya orang

asing ke dan dari wilayah Indonesia serta keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.

d. Terbitnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, dimana salah satu di antaranya mengatur bahwa pihak-pihak yang memiliki rencana penyampaian pendapat di muka umum terlebih dahulu harus memberitahukan kepada pihak kepolisian paling lambat 3 hari sebelum hari H memberikan kemudahan bagi aparat dan pihak-pihak terkait untuk mempersiapkan antisipasi terhadap kemungkinan tindakan anarkhis.
e. Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang baru.
f. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan KOMINDA memberikan legitimasi kepada daerah untuk membentuk dan menjalankan operasional Kominda di daerah untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan ancaman dan gangguan terhadap stabilitas daerah.
g. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat Di Daerah yang merupakan wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
h. Terbitnya surat Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Juni 2006 Nomor 220/1269/SJ/2006 perihal Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang satu diantaranya mengatur, bahwa Ormas atau LSM yang diperbolehkan melakukan aksi massa / penyampaian pendapat di muka umum adalah Ormas / LSM yang sudah terdaftar di Pemerintah Daerah cq Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Hal ini setidaknya telah memberikan kemudahan bagi aparat serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mengantisipasi dan mengendalikan kemungkinan terjadinya kerawanan keamanan, provokasi ataupun kemungkinan tindakan anarkhis.
i. Tumbuhnya lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap masalah sosial budaya seperti penyalahgunaan narkoba, kerukunan antar umat beragama serta persoalan moralitas cukup membantu meringankan pelaksanaan tugas antisipasi permasalahan kemasyarakatan.
j. Adanya Rencana Aksi Nasional HAM yang secara potensial akan mempermudah dan memperingan pelaksanaan upaya-upaya peningkatan penghormatan terhadap HAM.

B. Lingkungan Internal.

(1) Kelemahan.

a. Belum adanya perubahan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, sehingga masih banyak ketidak sesuaian nama Bidang dan Sub bidang antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dengan Kabupaten/Kota.
b. Keterbatasan kualitas dan kuantitas Personil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat mengurangi optimalitas pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan / digariskan dalam tugas pokok dan fungsi
c. Keterbatasan anggaran belum memungkinkan untuk merencanakan kegiatan - kegiatan dalam volume dan skala yang lebih besar sehingga optimalitas kinerja dalam mewujudkan visi misi dapat terhambat atau setidaknya tidak mampu terwujud dalam waktu yang cepat.
d. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang dapat berpengaruh pada kurang optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

(2) Kekuatan.

a. Kewenangan yang diberikan Pemda melalui Perda Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan – badan Daerah dan Keputusan Bupati Nomor : 60 Tahun 2000 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memberikan legitimasi pelaksanaan kegiatan.
b. Terbitnya Keputusan Bupati Kediri berkaitan Pembentukan DP-FKUB dan FKUB Kabupaten Kediri memungkinkan pemahaman tentang kerukunan umat beragama dan proses pendirian rumah ibadah kepada masyarakat untuk dilaksanakan berdasarkan kemampuan anggaran yang tersedia.
c. Terbitnya Surat Edaran Bupati Kediri tanggal 6 Januari 2006 Nomor 973/038/418.58/2006 tentang Penerbitan Rekomendasi KKN/ PKL/ Survei / Riset / PSG / Prakerin / Penelitian dan sejenisnya memungkinkan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk melakukan pengkajian dan pengendalian awal terhadap kegiatan-kegiatan yang melibatkan massa dalam jumlah relatif banyak untuk tidak mengganggu ketertiban dan stabilitas daerah.
d. Terbitnya Keputusan-keputusan Bupati tentang pembentukan mitra kerja seperti Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Kabupaten Kediri, Jaringan Informasi Strategis (JIS), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing sangat mendukung pelaksanaan kegiatan.
e. Ketersediaan anggaran kegiatan dari APBD meskipun terbatas namun setidaknya mampu mengakomodir pelaksanaan program dan kegiatan yang betul-betul prioritas.
f. Ketersediaan sarana kerja mulai dari ruangan kerja, perangkat komputer, beberapa peralatan pendukung penanganan darurat bencana dan kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2, meskipun terbatas setidaknya cukup mendukung kelancaran kegiatan.
g. Semangat dan kerjasama yang dari karyawan serta motivasi yang tinggi dari Pimpinan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

C. Faktor – Faktor Kunci Keberhasilan sebagai pendorong

1) Sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam RPJMN dan RPJMD telah sinkron dengan sasaran, arah kebijakan dan strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
2) Komitmen Bupati Kediri dan DPRD Kabupaten Kediri sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah.
3) Ketersediaan anggaran, sarana dan SDM.
4) Koordinasi dan Kerjasama yang baik dengan Lintas SKPD terutama dengan Lembaga Vertikal di Daerah.
5) Komitmen dan motivasi kuat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
6) Komitmen dukungan kinerja dari seluruh pejabat struktural dan staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
7) Dukungan mitra kerja terkait.
8) Dukungan dan partisipasi masyarakat.

D. Faktor – Faktor Penghambat

1. Berkenaan dengan Kebijakan Pemerintah Pusat dalam Pemberlakuan Moratorium berdampak pada Keterbatasan kuantitas dan kualitas Personil Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik sehingga mengurangi optimalitas pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan

/ digariskan dalam tugas pokok dan fungsi. Terkait hal ini diambil langkah-langkah memaksimalkan personil yang ada dan membekali kompetensi yang diperlukan.

2. Jadwal kegiatan pada Badan Keaatuan bangsa dan Politik yang sangat padat . Solusi yang diterapkan adalah dengan membuat skala prioritas kegiatan serta secara intensive mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan kepala daerah dengan tetap meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait.
3. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang dapat berpengaruh pada kurang optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Dalam hal ini diatasi dengan mengoptimalkan dan mengefektifkan penggunaan sarana yang ada.
4. Terdapatnya perubahan kebijakan Kementrian Dalam Negeri terkait perubahan Struktur Organisasi dan Tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi, Kabupaten/Kota se Indonesia melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Juga di dukung dengan tata pengelolaan perencanaan dan keuangan daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Taun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah. Sehingga secara keseluruhan baik perencaaan, Program dan kegiatan serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk Tahun 2021 mengalami perubahan yang sangat global yang didukung dengan penerapan SIPD yang seragam dengan basis persamaan Data untuk seluruh kab/kota maupun Provinsi se Indonesia.

2.3. Review Terhadap Rencana Awal RKPD

Dalam penyusunan Program Kerja Tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dalam penyusunan Program Kerja terdapat beberapa perubahan mendasar terhadap jenis Kegiatan yang ada. Hal ini disebabkan karena berdasarkan

1) Hasil Review dan Evaluasi Pendampingan Konsultan,
2) Hasil Asistensi dan Telaah dari Pimpinan

Sehingga perlu adanya penggeseran serta penekanan Program serta Kegiatan yang memiliki dan membutuhkan perhatian utama sesuai dengan agenda dan Isus-Isu yang berkembang dalam perjalanan Tahun pelaksanaan Program Kegiatan. Sehingga untuk Tahun 2024 bentuk penyederhanaan dengan Program dan kegiatan awal RKPD adalah sebagai berikut :

Berdasarkan diagram Program dan Kegiatan diatas jika dibandingkan dengan Tahun 2022 terdapat beberapa Tambahan subkegiatan pada Program Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yaitu

1) Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara.

Dengan Indikator yaitu Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara.

Adapun Program prioritas sesuai RPJMD pada bakesbangpol pada tahun 2024 adalah sebagai erikut ini ;

PROGRAM PRIORITAS PENUNJANG VISI DAN MISI

TAHUN 2024

VISI : Terwujudnya Masyarakat kabupten Kediri yang maju, berkarakter nasional religius serta sejahtera berdasarkan ekonomi kerakyatan yang didukung birokrasi yang melayani

NO	MISI	PROG / KEG / SUB KEG	ANGGARAN	SASARAN
1	2	3	4	5
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
	Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Nasionalis-Religius	**OUTPUT BERLANJUT/KEWAJIBAN YANG HARUS DILAKSANAKAN**		
		PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		
		Kegiatan Perumusan Kbijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		
		Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja dibidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Bangsa	20.985.000	- NILAI NASIONALISME DAN WAWASAN KEBANGSAAAN - PENCEGAHAN RADIKALISME, NILAI TOLERANSI DAN NON SARA
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Bangsa	421.212.800	- NILAI NASIONALISME DAN WAWASAN KEBANGSAAAN - PENCEGAHAN RADIKALISME, NILAI TOLERANSI DAN NON SARA

		Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi dibidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Bangsa		- NILAI NASIONALISME DAN WAWASAN KEBANGSAAAN - PENCEGAHAN RADIKALISME, NILAI TOLERANSI DAN NON SARA
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporani dibidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Bangsa	**5.652.500**	**NILAI NASIONALISME DAN KEBANGSAAAN**
		Sub Kegiatan Pembentukan Paskibraka	724.911.400	**NILAI NASIONALISME DAN KEBANGSAAAN**
		Sub Kegiatan Pengangkatan Purna Paskibraka	7.280.000	**NILAI NASIONALISME DAN KEBANGSAN**
		PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya		
		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		
		Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba , fasilitasi kerukunan umat beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah	**15.000.000**	PENCEGAHAN RADIKALISME, NILAI TOLERANSI DAN NON SARA
		Sub Kegiatan Penyusunan bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi , sosial Budaya dan fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan narkoba	**26.466.000**	PENCEGAHAN RADIKALISME, NILAI TOLERANSI DAN NON SARA

		Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	**141.432.000**	PENCEGAHAN RADIKALISME, NILAI TOLERANSI DAN NON SARA
		Sub Kegiatan Elaksanaan Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, sosial Budaya dan Fasilitasi kerukunan umat Beragama	247.138.000	PENCEGAHAN RADIKALISME, NILAI TOLERANSI DAN NON SARA
		PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial		
		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		NILAI NASIONALISME DAN KEBANGSAAAN
		Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	**91.098.000**	stabilitas dan kondusivitas daerah
	Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Nasionalis-Religius	**Sub Kegiatan** Penyusunan Bahan Perumusan di Bidang kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	**555.585.000**	stabilitas dan kondusivitas daerah

		Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	**8.510.800.000**	stabilitas dan kondusivitas daerah
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	**14.250.000**	stabilitas dan kondusivitas daerah
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini , Kerjasama Intelijen , pemantauan orang asing , tenaga kerja asing dan Lembaga asing , kewaspadaan pembatasan antar negara	**25.760.000**	Stabilitas dan Kondusivitas daerah
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	297.507.000	stabilitas dan kondusivitas daerah

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

A. Tujuan dan Sasaran

Adapun Tujuan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang didasarkan pada Visi dan Misi pada RPJMD Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

" MENINGKATNYA KERUKUNAN HIDUP ANTAR UMAT BERAGAMA"

Dengan Indikator Tujuan tersebut adalah Persentase Penanganan Konflik berlatar belakang agama yang ditindaklanjuti.

Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kediri merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja. Adapun **SASARAN STRATEGIK BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** terdiri dari 3 hal yaitu :

1. Terbangunnya Masyarakat yang berwawasan Kebangsaan.
2. Terciptanya Ketertiban, Ketentraman dan Keamanan yang berbasis pada kesadaran dan partisipasi masyarakat.
3. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Politik, Demokrasi dan HAM

B. Program dan Kegiatan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK) Kabupaten Kediri dijabarkan lebih lanjut kedalam sejumlah program, didalam setiap program terdapat sejumlah kegiatan yang merupakan operasionalisasi/penjabaran lebih lanjut dari program sebagai arah dan pencapaian tujuan dan sasaran strategik yang ada pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016 – 2021. Dimana dalam Program Kegiatan Tahun 2021 ini terdapat beberapa perubahan mendasar pada Program dan Kegiatan karena adanya perubahan Nomenklatur, kodifisikasi dan klasifikasi Program dan kegiatan serta Sub-kegiatan yang sudah dibakukan/disamakan untuk seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab/Kota maupun Provinsi se-Indonesia.

Berikut ini kami uraikan Program kegiatan Tahun 2022 sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

f. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b. Pengadaan Aset Tetap Lainnya

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

9. Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
c. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

d. elaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter
e. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

10. Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan

a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
b. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Polit
c. Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
d. Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
e. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan

11. Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

a. Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
b. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
c. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
d. Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
e. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

12. Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya

a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
b. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi

Kerukunan Umat Beragama dan

c. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
d. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
e. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

13. Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial

a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
b. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di
c. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta
d. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
e. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan
f. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

Untuk lebih detailnya berikut kami lampirkan hasil pemetaan antara Program dan Kegiatan yang lama dengan Program dan Kegiatan serta Sub-kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah.

PERANGKAAN RKPD DAN KUA-PPAS

BERDASARKAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI TA. 2024

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
						Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target		
8	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3,872,641,280
8	**01**	**001**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**13,556,741**
8	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Tersusunnya dokumen pernc, penganggaran dan evaluasi	4 dok	Desa doko Kec. Ngasem	6,699,600
8	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan				3,408,344
8	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan				3,448,797
8	**01**	**001**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**3,255,815,155**
8	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	Persentase layanan Adm Keuangan Perangkat Daerah	100%	Desa doko Kec. Ngasem	3,004,704,041
8	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen				238,820,000
8	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	0 Laporan				2,907,914

						Tahun SKPD					
8	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan				9,383,200
8	**01**	**001**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**155,299,862**
8	1	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	8 Dokumen	Persentase layanan barang milik daerah	100%	Desa doko Kec. Ngasem	112,922,262
8	1	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	13 Dokumen				28,528,600
8	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan				13,849,000
8	**01**	**001**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**5,075,000**
8	1	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	22 Dokumen	Persentase layanan adm kepegawaiaan	100%	Desa doko Kec. Ngasem	5,075,000
8	**01**	**001**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**352,047,186**
8	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Persentase layanan Adm Umum Perangkat Daerah	100%	Desa doko Kec. Ngasem	31,639,773
8	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket				4,462,500
8	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket				8,000,000
8	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket				7,742,943

8	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen				2,520,000
8	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan				297,681,970
8	**01**	**001**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**24,847,336**
8	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Desa doko Kec. Ngasem	10,137,336
8	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan				14,710,000
8	**01**	**001**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**66,000,000**
8	1	1	2.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang di pelihara	15 unit	Desa doko Kec. Ngasem	66,000,000
8	1	2			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN						1,898,856,600
8	**01**	**002**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**						**1,898,856,600**
8	1	2	2.01	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	2 Dokumen	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan Pelaksanaan bidang Ideologi	100%	Kab kediri	58,506,250

8	1	2	2.01	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 Dokumen	Pancasila dan Karakter Kebangsaan			47,670,000
8	1	2	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1583 Orang				1,503,085,350
8	1	2	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	296 Orang				185,300,000
8	1	2	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Laporan				14,265,000
8	1	2	2.01	6	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	200 Keluarga				90,030,000
8	1	3			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK						6,105,365,250

8	**01**	**003**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**						**6,105,365,250**
8	1	3	2.01	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan Pelaksanaan bidang Pendidikan Politik, Etika Politik, Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai politik, pemilihan Umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantuan situasi politik	100%	Kab kediri	56,105,000
8	1	3	2.01	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen				56,420,000
8	1	3	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	936 Orang				5,826,302,750

8	1	3	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	150 Orang				83,857,500
8	1	3	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	10 Laporan				82,680,000
8	1	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN						977,414,752
8	**01**	**004**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**						**977,414,752**
8	1	4	2.01	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan Pelaksanaan dibidang	100%	Kab kediri	55,317,500

8	1	4	2.01	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	9 Dokumen	pemberdayaan dan pengawasan ormas			4,800,000
8	1	4	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	299 Orang				872,825,252
8	1	4	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	42 Orang				38,840,000
8	1	4	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Laporan				5,632,000
8	1	5			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA						541,770,900
8	**01**	**005**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**						**541,770,900**

8	1	5	2.01	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	Persentase kelompok masyarakat yang dibina terkait narkoba, kerukunan beragama dan kepercayaan	100%	Kab kediri	13,500,000
8	1	5	2.01	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1 Dokumen				47,670,000
8	1	5	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	535 Orang				316,895,000
8	1	5	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	29 Orang				150,025,900

8	1	5	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2 Laporan				13,680,000
8	1	6			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL						2,877,363,400
8	**01**	**006**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**						**2,877,363,400**
8	1	6	2.01	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100%	Kab kediri	105,635,000
8	1	6	2.01	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	12 Dokumen				1,064,025,000

8	1	6	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100 Orang				483,810,000
8	1	6	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	50 Orang				133,662,000
8	1	6	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4 Laporan				133,015,000
8	1	6	2.01	6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen				957,216,400
TOTAL											16,273,412,182

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

Rencana Kerja barupa Program dan Kegiatan yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 sesuai data lampiran Renstra dengan memperhatikan target Anggaran dan kinerja serta berdasarkan hasil asistensi yang telah di- input ke dalam Aplikasi E-Planning pada SIPD sebagai bahan Renja Tahun Anggaran 2023 ditampilkan pada lampiran Tabel : Pagu Anggaran Program dan Kegiatan 2023.

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah								
Kabupaten Kediri								
Tahun 2023								
Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.28.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik								
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.28.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik								
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023	
						Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
8	1				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			14,076,289,682
8	1	1			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**3.626.579.146**
8	**01**	**001**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**13.557.375**
8	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	6.699.825

8	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	3.408.525
8	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	3.449.025
8	**01**	**001**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**3.009.751.926**
8	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	2.758.640.276
8	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	238.820.000
8	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	2.908.225
8	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	9.383.425
8	**01**	**001**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			**155.299.880**
8	1	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	8 Dokumen	112.922.280
8	1	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	13 Dokumen	28.528.600
8	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	13.849.000
8	**01**	**001**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**5.075.000**

8	1	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	22 Dokumen	5,075,000
8	**01**	**001**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**352.047.475**
8	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	31.639.850
8	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	4.462.500
8	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	8.000.000
8	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	7.743.125
8	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.520.000
8	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	297.682.000
8	**01**	**001**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**24.847.490**
8	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	10.137.490
8	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	14.710.000
8	**01**	**001**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**66.000.000**
8	1	1	2.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	66.000.000
8	1	2			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Cakupan kelompok yang dibina tentang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan**	**80%**	**2.289.545.700**

8	**01**	**002**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**			**2.289.545.700**
8	1	2	2.01	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	2 Dokumen	58.506.250
8	1	2	2.01	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 Dokumen	47.670.000
8	1	2	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1583 Orang	1.893.774.450
8	1	2	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	296 Orang	185.300.000

8	1	2	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Laporan	14.265.000
8	1	2	2.01	6	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	200 Keluarga	90.030.000
8	1	3			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Persentase partai politik yang difasilitasi**	**100%**	**6.105.365.250**
8	**01**	**003**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**			**6.105.365.250**
8	1	3	2.01	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	56.105.000

8	1	3	2.01	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	51.230.000
8	1	3	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	936 Orang	5.806.858.750
8	1	3	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	150 Orang	149.533.500

8	1	3	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	10 Laporan	41.638.000
8	1	4			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase Pembinaan Ormas**		**977.414.752**
8	**01**	**004**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**			**977.414.752**
8	1	4	2.01	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	55.317.500
8	1	4	2.01	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	9 Dokumen	4.800.000
8	1	4	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	299 Orang	872.825.252

8	1	4	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	42 Orang	38.840.000
8	1	4	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Laporan	5.632.000
8	1	5			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Persentase kelompok masyarakat yang dibina terkait narkoba, kerukunan beragama dan kepercayaan**	**70%**	**541.770.900**
8	**01**	**005**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**			**541.770.900**
8	1	5	2.01	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	13.500.000
8	1	5	2.01	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	47.670.000

8	1	5	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	535 Orang	316.895.000
8	1	5	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	29 Orang	150.025.900
8	1	5	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2 Laporan	13.680.000
8	1	6			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase konflik sosial yang ditindak lanjuti**	**90%**	**2.877.363.400**
8	**01**	**006**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**			**2,877,363,400**

8	1	6	2.01	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	105.635.000
8	1	6	2.01	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	12 Dokumen	1.064.025.000
8	1	6	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100 Orang	483.810.000

8	1	6	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	50 Orang	133.662.000
8	1	6	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4 Laporan	133.015.000
8	1	6	2.01	6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	957.216.400
TOTAL								**16.418.039.148**

BAB V
PENUTUP

Di dalam laporan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kediri telah diuraikan hasil pembangunan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun lalu serta Rencana Kerja Tahun 2024.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kediri Tahun 2024 merupakan Rencana Kerja Tahunan dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Bupati serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasikan melalui Rencana Kerja Pemerintah Darah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2024. Rencana Kerja ini dimaksudkan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari APBD Tahun anggaran 2024 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana ini, diharapkan penyelenggaran program/kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilaksanakan secara akuntabel, terukur, efektif dan efisien.

Kediri, - - 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kediri.

YULI MARWANTOKO, SE, MM
Pembina TK I
NIP. 19700717 199602 1 002

BUPATI KEDIRI,

HANANDITO HIMAWAN PRAMANA